

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bidang politik akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dibidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi (Maringka et al., 2024).

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Kota Bandar Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi biro administrasi pimpinan(*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2022*).

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal

terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal. (GP et al., 2020). Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Carolina et al., 2020).

Selama lima tahun terakhir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung telah berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan yang teridentifikasi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi dan profesionalisme aparatur di beberapa OPD, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang optimal.
2. Komitmen Organisasi: Tingkat komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi belum merata di seluruh OPD, sehingga mempengaruhi konsistensi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja.
3. Pengendalian Internal: Sistem pengendalian internal di beberapa OPD belum berjalan secara efektif, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran: Masih ditemukan ketidakjelasan dalam penetapan sasaran anggaran, yang mengakibatkan kurang optimalnya penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kinerja OPD masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, penguatan komitmen organisasi terhadap prinsip akuntabilitas, perbaikan sistem pengendalian internal, penetapan sasaran anggaran yang lebih jelas dan terukur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan. Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Mardiasmo (2018 : 28) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang.

Selain itu, pengendalian akuntansi berperan penting dalam menjaga keakuratan dan keandalan data keuangan instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi adalah prosedur dan metode yang digunakan perusahaan untuk memastikan keakuratan laporan keuangannya. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja

pemerintah daerah. Contoh pengendalian akuntansi yang dimaksud adalah pemisahan tugas, menetapkan batas kualifikasi, merekonsiliasi laporan bank, dan meninjau transaksi serta aktivitas. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Widaryanti & Pancawardani, 2020).

Selanjutnya sistem pelaporan memiliki pengaruh juga terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan yang baik memungkinkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Dan faktor yaitu pengawasan kualitas laporan keuangan juga memastikan bahwa laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan (Julita et al., 2023).

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Widaryanti & Pancawardani, 2020) dengan judul Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Yang membedakan penelitian ini adalah studi kasus dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
4. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan kualitas laporan keuangan dalam hubungannya dengan akuntabilitas kinerja. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN